

Opini Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Serentak Presiden Dan Legislatif Tahun 2019

Akhyar Anshori

University Muhammadiyah of Sumatera Utara

Jalan Mukhtar Basri. No. 3 Medan 20238

e-mail: akhyaransori@umsu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the public opinion of the city of Medan against the simultaneous election of the president and legislators in 2019 using quantitative research methods. In determining the sample, the researcher used a probability sampling method, then the sampling technique was a proportional stratified sample. The sample size uses the Slovin formula about determining the number of samples from a particular population with a 5% error requirement. The subject of this study involved the people of Medan city who have been registered as permanent voters in the upcoming elections in 2019. This study uses correlational analysis of data analysis techniques. Correlational analysis is statistical analysis that seeks to find relationships or influences between two or more variables. The conclusion of this study found that around 95.25% of respondents knew that the 2019 elections would be held simultaneously while electing the president and legislature. And 77.50% of respondents agreed to the implementation of presidential and legislative elections carried out simultaneously.

Keywords: *Public Opinion, Elections, President and Legislature*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini masyarakat kota Medan terhadap pemilihan serentak presiden dan anggota legislatif tahun 2019 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pada penentuan sampel, peneliti memakai metode pengambilan sampel secara *probability sampling*, kemudian teknik penarikan sampelnya berupa sampel berstrata proporsional. Adapun besaran sampel dengan menggunakan rumus Slovin tentang penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan syarat kesalahan 5%. Subjek penelitian ini melibatkan masyarakat kota Medan yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu tahun 2019 yang akan datang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis korelasional. Analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Simpulan dari penelitian ini menemukan bahwa sekitar 95,25% responden telah mengetahui bahwa pemilu tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak antara memilih presiden dan legislatif. Dan 77,50% responden menyatakan setuju terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif dilaksanakan secara bersamaan.

Kata Kunci: *Opini Publik, Pemilu, Presiden dan Legislatif*

Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bakal digelar secara berbeda. Yakni Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan serentak. Berbeda dengan Pemilu 2014 yang dilakukan terpisah. Pileg pada 9 April 2014 dan Pilpres pada 9 Juli 2014. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali dkk aturan pemilu serentak ini muncul, keluarnya putusan MK ini merupakan salah satu terobosan hukum baru. Dimana dalam amar putusannya MK menyatakan: Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional). Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas konstitusional tersebut, MK menegaskan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan putusan ini, ketentuan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) dilaksanakan setelah Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) adalah inkonstitusional, dalam diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan pemilu serentak akan diterapkan pada pemilu 2019.

Pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam hal memilih anggota legislatif dan presiden, merupakan

hal baru yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan serentak ini di satu sisi memberikan harapan baru bagi Indonesia dalam menata pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien, akan tetapi disisi lain pelaksanaan pemilu serentak ini mengundang tanda tanya di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut lagi, sudah seberapa sering penyelenggara mensosialisasikan tentang pelaksanaan pemilu serentak ini kepada masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan pelaksanaannya. Hal inilah yang menumbuhkan opini masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini.

Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman

politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Sedangkan Huntington dalam Rizkiyansyah (2007:3) menyatakan bahwa sebuah Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Menurut Rahman (2007:194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 1 Poin 1 dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

Melihat perubahan yang terdapat dalam pemilu tahun 2019 ini, maka secara tidak langsung akan memenuhi ruang pro kontra ditengah-tengah masyarakat, sehingga terbangun opini yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Medan. Opini

publik atau opini masyarakat adalah hasil penintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokrasi. Opini publik bukan seluruh pendapat individu-individu yang dikumpulkan (Abdurrachman, 1982:51). Sementara itu Cangara (2011:127) menyatakan bahwa opini publik atau pendapat umum merupakan gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat mempengaruhi orang lain, serta memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut. Ini berarti pendapat umum hanya bisa terbentuk kalau menjadi bahan pembicaraan umum, atau jika banyak orang penting (*elite*) mengemukakan pendapat mereka tentang suatu isi sehingga bisa menimbulkan pro atau kontra di kalangan anggota masyarakat.

Opini masyarakat atau publik merupakan salah satu bentuk dari efek proses komunikasi politik. Dalam komunikasi politik, setiap partai atau kandidat politik berusaha melakukan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik mengenai citra partainya. Salah satu cara dalam pembentukan opini publik ini adalah dengan penggunaan media massa. Media massa sering menjadi sumber informasi dan sebagai saluran komunikasi bagi para politisi. Media juga berperan dalam menyampaikan pemberitaan-pemberitaan politik (*political talks*) yang dapat membentuk opini publik mengenai masalah politik dan atau aktor politik. (Hamad, 2004:9).

Opini merupakan tanggapan aktif terhadap rangsangan. Menurut Nimmo (2000;10), opini terdiri atas

tiga komponen, yaitu kepercayaan, nilai dan pengharapan.

1. Kepercayaan

Kepercayaan sangat berkaitan erat dengan aspek kognitif atau pikiran seseorang. Dalam hal ini kepercayaan mengacu pada sesuatu yang dapat diterima oleh khalayak.

2. Nilai

Nilai merupakan preferensi yang dimiliki oleh seseorang terhadap tujuan tertentu dan dengan cara tertentu dalam melakukan sesuatu. Nilai atau preferensi ini sangat berkaitan erat dengan aspek afektif atau perasaan seseorang. Nilai mengacu pada rasa suka atau tidak suka, penting atau tidak penting serta seberapa besar intensitasnya bagi orang tersebut.

3. Pengharapan

Pengharapan berkaitan erat dengan aspek konatif atau kecenderungan seseorang dalam bertindak di masa yang akan datang. Pengharapan sering kali juga dikatakan sebagai gerak hati, hasrat, kemauan ataupun dorongan.

Dalam proses pembentukan opini, terdapat beberapa faktor penting, antara lain latar belakang sejarah, faktor biologis, faktor sosial dan faktor psikologis. (Cangara, 2011;134-136).

Opini publik atau opini masyarakat adalah hasil penintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokrasi. Opini publik bukan seluruh pendapat individu-individu yang dikumpulkan (Abdurrachman, 1982:51). Sementara itu Cangara (2011:127) menyatakan bahwa opini publik atau pendapat umum

merupakan gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat mempengaruhi orang lain, serta memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut. Ini berarti pendapat umum hanya bisa terbentuk kalau menjadi bahan pembicaraan umum, atau jika banyak orang penting (*elite*) mengemukakan pendapat mereka tentang suatu isi sehingga bisa menimbulkan pro atau kontra di kalangan anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang opini mahasiswa kota Medan terhadap iklan politik calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang dilakukan oleh Lubis menemukan bahwa opini mahasiswa kota Medan sangat beragam dalam melihat alat peraga kampanye, dan pesan politik yang disampaikan melalui iklan media

luar ruang memberikan tingkat penerimaan yang baik bagi mahasiswa (Lubis, 2018:166).

Terkait dengan media sosialisasi, sudah semestinya media sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dilakukan secara massif dan menyeluruh. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Anshori (2018:142) bahwa, media sosialisasi memiliki hubungan yang kuat dalam menentukan sikap dan pengetahuan pemilih.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif, dengan pendekatan analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Karena penelitian ini merupakan penelitian korelasional, maka penelitian ini bermaksud mendeteksi sejauh mana variasi-variasi atau lebih faktor lain

berdasarkan koefisien korelasinya. Sedangkan analisis regresi linear sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kota Medan. Populasi pada penelitian ini yang merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah 1.621.917 orang. Sedangkan sampel yang digunakan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 400 orang.

Hasil dan Pembahasan

Terkait dengan pengetahuan responden terhadap pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, 95,75% responden telah mengetahui bahwa pemilu tahun 2019 akan dilaksanakan bersamaan antara

pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden, sedangkan 4,75% responden belum mengetahui bahwa pemilu 2019 akan dilaksanakan bersamaan antara memilih anggota legislatif dengan presiden.

Opini masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, 77,50% responden setuju bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak antara memilih anggota legislative dengan presiden. 18,50% responden menyatakan biasa saja terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan 4,00% responden menyatakan tidak setuju pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak.

Terkait dengan politik uang yang terjadi dalam pemilu, 73,50% responden menyatakan bahwa politik

uang itu adalah sebuah kegiatan yang buruk. 6,00% responden menyatakan bahwa politik uang itu tidak buruk dan 20,50% responden menyatakan bahwa politik uang dalam pemilu merupakan sebuah kegiatan yang biasa saja.

Hasil penelitian terkait sikap responden terhadap pemberian dari calon yang turut serta dalam pemilu 2019, 47,25% responden menyatakan akan menerima pemberiana dari calon peserta pemilu 2019. 42,25% menyatakan tidak akan menerima pemberian dari calon peserta pemilu 2019. Dan terdapat 10,00% responden yang tidak dapat memberikan jawaban terkait pemberian kepada responden dari calon peserta pemilu 2019.

Media atau alat perga yang paling efektif menurut responden adalah dengan melakukan sosialisasi melalui televise, hal ini disampaikan

oleh 22,75% responden. Sementara itu menggunakan media baju kaos dinyatakan oleh 20,75% responden. Selanjutnya 18,50% responden menyatakan spanduk merupakan media efktif dalam mensosialisasikan diri calon peserta pemilu 2019. 15,00% responden menyatakan kalender merupakan media yang efektif sebagai bagian dari media sosialisasi. Sedangkan 13,00% responden menyatakan bahwa baliho merupakan alat peraga kampanye yang efektif dalam mensosialisasikan calon peserta pemilu. Selebihnya responden menjawab alat peraga kampanye yang efektif dengan menggunakan poster sebesar 3,00%, Koran atau surat kabar 1,25%, sticker 0,25%, Pin 0,50%, melalui Radio 0,75% dan media lainnya sebesar 2,00% serta 2,25% responden tidak memberikan jawaban.

Sementara itu media sumber referensi terpercaya bagi para responden, 61,50% responden menyatakan bahwa media TV menjadi sumber terpercaya dalam melihat perkembangan pemilu 2019. 14,25% responden menyatakan bahwa informasi yang disajikan melalui media online, menjadi bagian dari sumber referensi yang dapat dipercaya. 10,00% responden menyatakan bahwa sumber referensi yang dapat dipercaya adalah informasi yang disampaikan melalui media sosial, selanjutnya 5,00% menyatakan melalui media Koran atau surat kabar dan selebihnya 1,00% menyatakan radio, 0,50% menyatakan majalah, 3,25% menyatakan grup pertemanan online, dan media lainnya ada sekitar 4,50%.

Sikap politik masyarakat Kota Medan terhadap pilihan politiknya terkait dengan calon anggota DPR RI

berdasarkan latar belakang partai politik, 27,75% responden menyatakan akan memilih Partai Gerindra, dirutan kedua sekitar 12,75% responden menyatakan akan memilih PDIP, selanjutnya peringkat ketiga di tempati oleh PAN dengan tingkat keterpilihan dari responden sekitar 12,25%. Selanjutnya diikuti Demokrat 6,50%, PKS 5,25%, Golkar 4,25%, PKB 2,50%, PPP 2,25%, Nasdem 2,00%, Dengan 14,75% responden belum memberikan jawaban ataupun belum tau dan 6,25% menyatakan tidak memilih.

Alasan responden memilih calon anggota legislatif itu antara lain adalah karena berasal dari partai yang didukung sekitar 9,25%, 8,25% menyatakan karena orangnya tegas, 7,75% menyatakan karena orangnya perhatian pada rakyat, 7,00% menyatakan karena

berpengalaman, 6,75% karena calonnya pintar dan sekitar 6,50% menyatakan calon yang akan dipilih karena orangnya jujur dan bersih dari KKN. Adapun 22,00% responden tidak memberikan alasan atau karena rahasia.

Untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Sumatera Utara, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 6 calon dengan perolehan suara tertinggi adalah Abdul Hakim Siagian dengan memperoleh 8,00% Suara, Muhammad Nuh 4,50%, Ali Yakub Matondang dan Parlindungan Purba masing-masing 3,00%, serta Dedi Iskandar Batubara dan Faisal Amri masing-masing 2,75% serta 18,25% responden menyatakan tidak memilih dan 47,50% responden menyatakan tidak tahu atau belum menjawab.

Sementara itu terkait sikap politik pemilih terhadap pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019, 59,00% responden menjatuhkan pilihan kepada pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno, Sedangkan 22,50% responden memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan 18,50% responden tidak menjawab.

Sementara itu berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan responden dalam menentukan sikap politik terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih, ditemukan bahwa, responden tamatan SD sederajat, dari 39 orang responden, 38,46% nya memilih Jokowi-Ma'ruf Amin dan 17,95% nya akan memilih Prabowo-Sandiaga Uno. Untuk responden tamatan SMP sederajat dari 42 orang, 83,33% responden akan memilih Jokowi-ma'ruf Amin dan

11,90% responden memilih Prabowo-Sandiaga Uno. Sedangkan untuk responden tamatan SMA sederajat yang berjumlah 230 orang, 14,78% responden akan memilih Jokowi-Ma'ruf Amin sedangkan 67,83% responden memilih Prabowo-Sandiaga Uno. Dan untuk responden yang tamatan pendidikan tinggi baik Diploma I sampai Sarjana yang berjumlah 89 orang, 76,40% responden akan memilih Prabowo-Sandiaga Uno dan 6,74% responden akan memilih Jokowi-Ma'ruf Amin.

Melihat dari hasil tersebut, dapat diutarakan bahwa dari latar belakang pendidikan, pemilih Jokowi-Ma'ruf amin merupakan pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan mayoritas menengah kebawah, hal ini dapat dilihat dari 90 orang responden atau sekitar 22,50% responden, 55,56% diantaranya merupakan responden yang memiliki

latar belakang pendidikan SMP kebawah, dengan hanya sekitar 44,44% yang memiliki latar belakang pendidikan SMA ke atas. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan para responden yang menentukan pilihannya kepada Prabowo-Sandiaga Uno. Dari 236 Orang responden atau sekitar 59,00% responden, 5,08% responden merupakan tamatan SMP sederajat kebawah, sedangkan 94,92% responden merupakan tamatan SMA sederajat keatas.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang opini masyarakat Medan terhadap pemilihan serentak presdiden dan legislatif tahun, dapat ditarik simpulan sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa sekitar 95,25% responden

- telah mengetahui bahwa pemilu tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak antara memilih presiden dan legislatif. Dan 77,50% responden menyatakan setuju terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif dilaksanakan secara bersamaan.
2. Hasil penelitian juga melihat bahwa tanggapan responden terhadap *money politics*, 73,50% responden menyatakan bahwa *money politics* adalah merupakan perbuatan yang buruk, dengan 20,50% responden menyatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi dan 6,00% responden menyatakan bahwa *money politics* bukanlah sebuah hal yang buruk.
 3. Terkait dengan preferensi politik pemilih, 20,75% responden menyatakan alat peraga kampanye yang paling efektif adalah dilakukan melalui iklan di televisi. Hal ini sebanding dengan jawaban dari 61,50% responden yang menyatakan bahwa siaran televisi merupakan bagian dari media referensi yang dipercaya oleh para responden.
 4. Selanjutnya terkait dengan sikap politik responden dalam menentukan pilihan, untuk calon Anggota DPR RI, 27,75% responden akan memilih calon yang berasal dari partai Gerindra, 12,75% responden akan memilih calon yang berasal dari PDIP dan 12,25% responden akan memilih calon yang berasal dari PAN. Untuk Calon Anggota DPD RI, terdapat 6 calon dengan perolehan suara tertinggi, yakni: Abdul Hakim Siagian 8,00%, Muhammad Nuh 4,50%, Ali Yakub Matondang dan

Parlindungan Purba masing-masing 3,00%, serta Dedi Iskandar Batubara dan Faisal Amri masing-masing 2,75%.

5. Untuk pilihan calon Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, 59,00% responden menyatakan akan memilih Prabowo-Sandiaga Uno dan hanya 22,50% responden yang menyatakan akan memilih Jokowi-Ma'ruf Amin dengan 18,50% responden yang belum memberikan jawaban.

6. Sementara itu dari latar belakang pendidikan terakhir responden, pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin mayoritas merupakan pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir pada jenjang pendidikan SMP sederajat kebawah dengan angka sekitar 55,56%. Sedang pemilih Prabowo-Sandiaga Uno

merupakan pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA sederajat keatas yang berkisar 94,92%.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, Oemi. 1982. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Alumni
- Anshori, Akhyar. 2018. *Pengaruh Iklan Politik Terhadap Persepsi Pemilih Kota Medan Tahun 2018*. Jurnal Interaksi Vol. 2 No. 2, Hal: 132-144 FISIP UMSU. Medan.
- Cangara, Hafid. 2011. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Faizal, Hamzah. 2018. *Opini Mahasiswa Kota Medan Terhadap Iklan Politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*. Jurnal Interaksi Vol. 2 No. 2, Hal: 157-166 FISIP UMSU. Medan.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Haris, Syamsuddin. 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Rahman. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Ridwan, 2008, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.

Rizkiyansyah, F, K. 2007. *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: IDEA Publishing.

Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum